

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. SRIKANDI, yang diwajibkan sejak 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022, bertujuan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan arsip. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa implementasi aplikasi ini belum optimal, dengan banyak arsip yang masih dikelola secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi SRIKANDI di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, 2) mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, dan 3) mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operator SRIKANDI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI masih belum optimal karena rendahnya dedikasi pelaksana kebijakan, yang ditunjukkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terkait tata cara penggunaan aplikasi, belum memahami manfaat dan fungsi SRIKANDI, ketergantungan pada bantuan staf, minimnya arahan dan penekanan dari pimpinan, serta pengelolaan arsip yang sering dianggap tidak mendesak dan diabaikan. Selain itu, implementasi SRIKANDI juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya keterampilan dan kenyamanan staf dalam menggunakan aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana, tidak adanya pedoman dan arahan teknis yang jelas dari pihak terkait, serta kurangnya koordinasi antara unit kerja. Meskipun demikian, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menunjukkan komitmen dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui rencana peningkatan sosialisasi dan pelatihan, pembentukan tim khusus, serta pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Kata Kunci : Implementasi, SRIKANDI, Sosialisasi, Koordinasi.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) at the Office of the Ministry of Religious Affairs in Lhokseumawe City. SRIKANDI, which has been mandated since December 1, 2022, by Circular Letter No. 31 of 2022 from the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs, aims to support the Electronic-Based Government System (SPBE) by enhancing transparency, accountability, and efficiency in archive management. However, preliminary observations indicate that the implementation of this application has not yet been optimal, with many archives still being managed conventionally. This study aims to: 1) analyze the implementation of SRIKANDI at the Office of the Ministry of Religious Affairs in Lhokseumawe City, 2) identify the challenges in its application, and 3) evaluate the efforts made to address these challenges. The research employs a qualitative descriptive analysis method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of Civil Servants (ASN) and SRIKANDI operators within the Office of the Ministry of Religious Affairs in Lhokseumawe City. The results show that the implementation of SRIKANDI has not yet been optimal due to the low dedication of policy implementers, as evidenced by several factors such as a lack of understanding of how to use the application, insufficient comprehension of the benefits and functions of SRIKANDI, reliance on staff assistance, limited direction and emphasis from leadership, and the frequent neglect of archive management, which is often considered non-urgent. Additionally, the implementation of SRIKANDI faces several challenges, such as the lack of staff skills and comfort in using the application, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, the absence of clear technical guidelines and instructions from relevant parties, and poor coordination between work units. Nevertheless, the Office of the Ministry of Religious Affairs in Lhokseumawe City has demonstrated commitment and efforts to overcome these challenges through planned improvements in socialization and training, the formation of a special team, and the provision of more adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, SRIKANDI, Socialization, Coordination.